



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

TAHUN 2025 (UNAUDITED)



www.pn-pontianak.go.id



0812 5775 8489 (INDI Whatsapp Bot)

KATA PENGANTAR

**LAPORAN KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN 2025
(UNAUDITED)**



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup aset-aset yang dimiliki negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan BMN merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara terintegrasi dan transparan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN, Pengadilan Negeri Pontianak sebagai salah satu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di bawah Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), yaitu Badan Urusan Administrasi untuk DIPA 01 melalui Biro Perlengkapan. LBKP Pengadilan Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara untuk periode tahunan.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik



Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan komitmennya menyajikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung penyusunan laporan ini.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LBKP Tahunan Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*), kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Pontianak. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di jajaran manajemen Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Pontianak, 23 Februari 2026

Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak

Selaku Kuasa Pengguna Barang



Juniar Nelly

DAFTAR ISI

**LAPORAN KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN 2025
(UNAUDITED)**



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK



DAFTAR ISI

DATA UTAMA

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
4. Laporan Barang Persediaan
5. Laporan Barang Intrakomptabel
6. Laporan Barang Ekstrakomptabel
7. Laporan Barang Gabungan
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. Laporan Aset Tak Berwujud
10. Laporan Barang Bersejarah
11. Laporan Barang Rusak Berat
12. Laporan Barang Hilang
13. Laporan Barang BPYBDS
14. Laporan Barang Hibah DK/TP
15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel
16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel
17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud
18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)
19. Laporan PNBPN (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)
20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara
21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara



DATA TAMBAHAN

1. Neraca Percobaan Berbasis Akrual dan Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja (2 Dokumen Cetak)
2. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya
3. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)
4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan
5. Gambaran Umum Terkait Pengelolaan BMN

DAFTAR LAMPIRAN

LAPORAN KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN 2025
(UNAUDITED)



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode Persediaan (jika ada)
2. Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode BMN (jika ada)
3. Penjelasan BMN: Jalan dan Jembatan (jika ada)
4. Penjelasan BMN: Irigasi (jika ada)
5. Penjelasan BMN: Jaringan (jika ada)
6. Penjelasan BMN: Aset Tetap Renovasi (jika ada)
7. Penjelasan BMN: Aset Tak Berwujud Lainnya (jika ada)
8. Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Persediaan (jika ada)
9. Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (jika ada)
10. Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi (jika ada)
11. Penjelasan BMN: Koreksi atas Reklas Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (jika ada)
12. Penjelasan BMN: Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)
13. Penjelasan BMN: Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)
14. Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin (jika ada)
15. Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan (jika ada)
16. Penjelasan BMN: Beban Pelepasan Aset (jika ada)
17. Penjelasan BMN: Beban Persediaan Rusak/Usang (jika ada)

OVERVIEW
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
TAHUN 2025 (UNAUDITED)



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK



OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025 (UNAUDITED)

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 *Unaudited* merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Pengadilan Negeri Pontianak selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode Tahun Anggaran 2025 serta mutasi selama periode tersebut. LBP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Negeri Pontianak selama Tahun Anggaran 2025.

Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Pontianak beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBP *Unaudited* ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*).

Penyusunan LBKP (*Unaudited*) ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBP (*Unaudited*) ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2025, dan Nomor S-3/KN/KN.2/2025 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Dalam penyusunannya, LBP (*Unaudited*) ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MonSAKTI (Monitoring SAKTI) milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.

Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, yang terdiri dari:

1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi aset



BMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Selain itu, laporan ini juga merinci Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);

2. Nilai Neraca per 31 Desember 2025 adalah Rp 54.720.914.061,- (*lima puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus empat belas rubi enam puluh satu rupiah*) yang berasal dari nilai saldo awal 1 Januari 2025 sebesar Rp 55.954.453.270,- (*lima puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga dua ratus tujuh puluh rupiah*) dan mutasi tambah kurang sebesar Rp 1.233.539.209,- (*satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan dua ratus sembilan rupiah*);
3. Mutasi tambah aset terjadi karena: (1) realisasi belanja modal, terdiri atas pembelian, renovasi, dan pembangunan bangunan gedung baru; (2) hibah masuk BMN; (3) Transfer Masuk BMN; (4) Koreksi Nilai Bertambah (5) Perolehan Lainnya dan lain sebagainya. Total mutasi tambah aset adalah sebesar Rp 42.981.650.700,- (*empat puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah*);
4. Mutasi kurang aset terjadi karena: (1) pemindahtanganan BMN (jika ada penghapusan melalui penjualan); (2) hibah keluar BMN; (3) transfer keluar; (4) pemusnahan BMN; (5) Koreksi Nilai Berkurang (6) penghapusan BMN dan lain sebagainya. Total mutasi kurang aset adalah sebesar Rp 42.692.790.700,- (*empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah*);
5. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Barang Pengguna, serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikan dalam Neraca dan informasi penting lainnya; dan
6. Gambaran Umum Pengelolaan BMN: bagian ini memuat data Penetapan Status Penggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaan); pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan): 1) dalam proses permohonan ke



Pengelola; 2) dalam proses Pengelola Barang; 3) selesai di Pengelola Barang baik dikembalikan, ditolak dan disetujui; 4) dalam proses tindak lanjut Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang; 5) telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang; 6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan 7) selesai serah terima.

LBKP (*Unaudited*) ini merupakan landasan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Tahun 2025 (*Unaudited*). Penyusunan LBKP (*Unaudited*) yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP (*Unaudited*) ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyusun LBKP (*Unaudited*) secara tepat waktu dan akurat, Pengadilan Negeri Pontianak telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

TAHUN 2025 (UNAUDITED)



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Negeri Pontianak dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;



- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik



Negara;

- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 35) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Negeri Pontianak selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN



A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodifikasi

Penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodifikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara**. Kodifikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2025, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodifikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodifikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodifikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodifikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.



B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Negeri Pontianak. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodifikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar**.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.



C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Negeri Pontianak, dalam LBKP Tahun 2025 (*Unaudited*) ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat**.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:



1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**



Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 84/BUA.4/PL1.2.7/II/2026 Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui **Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat K/L Tahun 2025 dan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-3/KN/KN.2/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada K/L Tahun 2025 (Unaudited)**.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Pontianak. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) ini adalah sebesar Rp 69.177.390.174,- (*enam puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp 68.888.530.174,- (*enam puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh*



delapan juta lima ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2025 sebesar Rp 85.674.441.400,- *(delapan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah)*. Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp 42.981.650.700,- *(empat puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah)* dan mutasi kurang sebesar Rp 42.692.790.700,- *(empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah)* yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2025
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;



14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2025 menurut Pengadilan Negeri Pontianak adalah sebesar Rp 68.888.530.174,- (*enam puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp 68.791.889.399,- (*enam puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 96.640.775,- (*sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*).

B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Tahun 2025 (*Unaudited*) yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 13.900.200 (*tiga belas juta sembilan ratus ribu dua ratus rupiah*).



Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah	Kurang	
117111	Barang Konsumsi	30.529.900	78.105.700	103.107.000	5.528.600
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	29.577.200	21.498.700	42.704.300	8.371.600
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0	0
117131	Bahan Baku	0	0	0	0
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0	0	0	0
Jumlah		60.107.100	99.604.400	145.811.300	13.900.200

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp 0,- (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp 0,- (*nol rupiah*).

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 48.759.467.000,- (empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 9,850 m² dengan nilai sebesar Rp 48.759.467.000,- (empat



puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp 30.609.097.000,- (tiga puluh miliar enam ratus sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp 30.609.097.000,- (tiga puluh miliar enam ratus sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Masuk	30.609.097.000

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah

Mutasi Kurang Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar	30.609.097.000

Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah

Dari jumlah/ nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 m² bidang dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan 0 bidang dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	9.850	48.759.467.000

Tabel 4. Kondisi Tanah

Tidak terdapat saldo tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1.233 unit dengan nilai sebesar Rp 6.763.559.132,- (*enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1.208 unit



dengan nilai sebesar Rp 6.474.699.132,- (*enam miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah*), mutasi tambah sebanyak 25 unit dengan nilai sebesar Rp 288.860.000,- (*dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Bantu (3.01.03)

Saldo Alat Bantu pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp 267.663.000,- (*dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp 267.663.000,- (*dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutasi	0	0

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Bantu

Mutasi Kurang Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutasi	0	0

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Bantu

Dari jumlah Alat Bantu di atas, Saldo Alat Bantu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).



Rincian data Alat Bantu berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	2	267.663.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 7. Kondisi Alat Bantu

b. Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01)

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp 1.815.743.941,- (*satu miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp 1.815.743.941,- (*satu miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutasi	0	0

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Bermotor

Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutasi	0	0

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Bermotor

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor di atas, Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).



Rincian data Alat Angkutan Darat Bermotor berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	9	1.747.043.941
Rusak Ringan	1	68.700.000
Rusak Berat	0	0

Tabel 10. Kondisi Alat Angkutan Darat Bermotor

c. Alat Kantor (3.05.01)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 178 buah dengan nilai sebesar Rp 531.907.688,- (*lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 175 buah dengan nilai sebesar Rp 511.807.688,- (*lima ratus sebelas juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*) mutasi tambah sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp 20.100.000,- (*dua puluh juta seratus ribu rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutasi	20.100.000	0

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor

Mutasi Kurang Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutasi	0	0

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Alat Kantor

Dari jumlah Alat Kantor di atas, Saldo Alat Kantor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan



nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Rincian data Alat Kantor berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	112	455.870.294
Rusak Ringan	66	76.037.394
Rusak Berat	0	0

Tabel 13. Kondisi Alat Kantor

d. Alat Rumah Tangga (3.05.02)

Saldo Alat Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 767 unit dengan nilai sebesar Rp 2.063.638.895,- (*dua miliar enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 747 unit dengan nilai sebesar Rp 1.809.578.895,- (*satu miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*) mutasi tambah sebanyak 20 unit dengan nilai sebesar Rp 254.060.000,- (*dua ratus lima puluh empat juta enam puluh ribu rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Rumah Tangga	254.060.000	0

Tabel 14. Rincian Mutasi Tambah Alat Rumah Tangga

Mutasi Kurang Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Rumah Tangga	0	0

Tabel 15. Rincian Mutasi Kurang Alat Rumah Tangga



Dari jumlah Alat Rumah Tangga di atas, Saldo Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Rincian data Alat Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	668	1.908.982.616
Rusak Ringan	99	154.656.279
Rusak Berat	0	0

Tabel 16. Kondisi Alat Rumah Tangga

e. Alat Studio (3.06.01)

Saldo Alat Studio pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 61 unit dengan nilai sebesar Rp 350.358.820,- (*tiga ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 60 unit dengan nilai sebesar Rp 336.358.820,- (*tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah*) mutasi tambah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutasi	14.000.000	0

Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Alat Studio

Mutasi Kurang Alat Studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutasi	0	0

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Alat Studio



Dari jumlah Alat Studio di atas, Saldo Alat Studio yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Rincian data Alat Studio berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	52	342.026.320
Rusak Ringan	9	8.332.500
Rusak Berat	0	0

Tabel 19. Kondisi Alat Studio

f. Alat Komunikasi (3.06.02)

Saldo Alat Komunikasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 23 unit dengan nilai sebesar Rp 56.676.100,- (*lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 23 unit dengan nilai sebesar Rp 56.676.100,- (*lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah*) mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutasi	0	0

Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Alat Komunikasi

Mutasi Kurang Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutasi	0	0

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Alat Komunikasi

Dari jumlah Alat Komunikasi di atas, Saldo Alat Komunikasi yang



statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Rincian data Alat Komunikasi berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	23	56.676.100
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 19. Kondisi Alat Komunikasi

g. Alat Kedokteran (3.07.01)

Saldo Alat Kedokteran pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp 1.900.000,- (*satu juta sembilan ratus ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp 1.900.000,- (*satu juta sembilan ratus ribu rupiah*) mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kedokteran tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutasi	0	0

Tabel 20. Rincian Mutasi Tambah Alat Kedokteran

Mutasi Kurang Alat Kedokteran tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutasi	0	0

Tabel 21. Rincian Mutasi Kurang Alat Kedokteran

Dari jumlah Alat Kedokteran di atas, Saldo Alat Kedokteran yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit



dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Rincian data Alat Kedokteran berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	1	19.000.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 22. Kondisi Alat Kedokteran

h. Komputer Unit (3.10.01)

Saldo Komputer Unit pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 101 unit dengan nilai sebesar Rp 1.305.250.036,- (*satu miliar tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh enam rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 101 unit dengan nilai sebesar Rp 1.305.250.036,- (*satu miliar tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh enam rupiah*) mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutasi	0	0

Tabel 23. Rincian Mutasi Tambah Komputer Unit

Mutasi Kurang Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutasi	0	0

Tabel 24. Rincian Mutasi Kurang Komputer Unit

Dari jumlah Komputer Unit di atas, Saldo Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai



sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Rincian data Komputer Unit berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	97	1.243.925.036
Rusak Ringan	4	61.325.000
Rusak Berat	0	0

Tabel 25. Kondisi Komputer Unit

i. Peralatan Komputer (3.10.02)

Saldo Komputer Unit pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 90 unit dengan nilai sebesar Rp 370.420.652,- (*tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 89 unit dengan nilai sebesar Rp 369.720.652,- (*tiga ratus enam puluh sembilan tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) mutasi tambah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Peralatan Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	0	700.000

Tabel 26. Rincian Mutasi Tambah Peralatan Komputer

Mutasi Kurang Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutasi	0	0

Tabel 27. Rincian Mutasi Kurang Peralatan Komputer

Dari jumlah Peralatan Komputer di atas, Saldo Peralatan Komputer yang



statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Rincian data Peralatan Komputer berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	54	349.690.652
Rusak Ringan	36	20.730.000
Rusak Berat	0	0

Tabel 28. Kondisi Peralatan Komputer

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Pontianak Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 5.826.583.940,- (*lima miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp 5.769.811.219,- (*lima miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus sembilan belas rupiah*) dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp 56.772.721,- (*lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah*).

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 195.210.000,- (*seratus sembilan puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*).

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 18 unit dengan nilai sebesar Rp 13.640.844.200,- (*tiga belas miliar enam ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 18 unit dengan nilai sebesar sebesar Rp 13.640.844.200,- (*tiga belas miliar enam ratus empat puluh*



juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah), mutasi tambah sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp 12,083,693,700,- (dua belas miliar delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp 12.083.693.700,- (dua belas miliar delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung Tempat Kerja (4.01.01)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp 12.308.257.200,- (*dua belas miliar tiga ratus delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp 12.308.257.200,- (*dua belas miliar tiga ratus delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*), mutasi tambah sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp 12,083,693,700,- (*dua belas miliar delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp 12.083.693.700,- (*dua belas miliar delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*).

Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Masuk	12.083.693.700	0

Tabel 29. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Kerja

Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar	12.083.693.700	0

Tabel 30. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Kerja

Rincian data Bangunan Gedung Tempat Kerja berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:



Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	6	12.308.257.200
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 31. Kondisi Bangunan Gedung Tempat Kerja

b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal (4.01.02)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 12 unit dengan nilai sebesar Rp 1.332.587.000,- (*satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 12 unit dengan nilai sebesar Rp 1.332.587.000,- (*satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Tinggal tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutasi	0	0

Tabel 32. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Tinggal tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutasi	0	0

Tabel 33. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Rincian data Bangunan Gedung Tempat Tinggal berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:



Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	12	1.332.587.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 34. Kondisi Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Pontianak Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 8.601.155.690,- (*delapan miliar enam ratus satu juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar Rp 8.600.109.455,- (*delapan miliar enam ratus juta seratus sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*) dan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp 1.046.235,- (*satu juta empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*).

5. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah Jalan dan Jembatan, 0 buah Irigasi, serta 0 buah Jaringan dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah (jalan dan jembatan/irigasi/jaringan) dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah (jalan dan jembatan/irigasi/jaringan) dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutas	0	0

Tabel 35. Rincian Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan



Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutasi	0	0

Tabel 36. Rincian Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Pontianak Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*), dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 30 buah dengan nilai sebesar Rp 9.839.869,- (*sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 30 buah dengan nilai sebesar Rp 9.839.869,- (*sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*). Tidak terdapat mutasi nilai.

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan Tercetak (6.01.01)

Saldo Bahan Perpustakaan Tercetak pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 30 buah dengan nilai sebesar Rp 9.839.869,- (*sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 30 buah dengan nilai sebesar Rp 9.839.869,- (*sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*), Tidak terdapat mutasi nilai.



Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan Tercetak tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutasi	0	0

Tabel 37. Rincian Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan Tercetak tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mutasi	0	0

Tabel 38. Rincian Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Pontianak Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak terdapat Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2025.

8. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*), dan tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang.

Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pengadilan Negeri Pontianak tidak memiliki BMN berupa Aset Kemitraan



dengan Pihak Ketiga.

b. Aset Tak Berwujud

Pengadilan Negeri Pontianak tidak memiliki BMN berupa Aset Tak Berwujud.

c. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 22 buah dengan nilai sebesar Rp 3.679.973,- (*tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 22 buah dengan nilai sebesar Rp 3.679.973,- (*tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0,- (*nol rupiah*).

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	0	0
2. Peralatan dan Mesin	3.114.864	565.109
3. Gedung dan Bangunan	0	0
4. Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan	0	0
5. Aset Tetap Lainnya	0	0
Jumlah	3.114.864	565.109

Tabel 39. BMN yang Telah Dihentikan Penggunaannya per 31 Desember 2025

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.679.973,- (*tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh*



puluh tiga rupiah).

d. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional

Pemerintah

Aset Tak Berwujud (ATB) yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*), dan tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang.

9. Aset Bersejarah

Pengadilan Negeri Pontianak tidak memiliki BMN berupa Aset Bersejarah.

V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2025

A. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp54.720.914.061,- (*lima puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus empat belas ribu enam puluh satu rupiah*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	13.900.000	0%	0	0%	13.900.000	0%
	Sub Jumlah (1)	13.900.000	0%	0%	0	13.900.000	0%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	48.759.467.000	71%	0	0%	48.759.467.000	70%
2	Peralatan dan Mesin	6.689.780.966	10%	73.778.166	76%	6.763.559.132	10%



3	Gedung dan Bangunan	13.617.846.700	20%	22.997.500	24%	13.640.844.200	20%
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	0%	0	0%	0	0%
5	Aset Tetap Lainnya	9.839.869	0%	0	0%	9.839.869	0%
6	KDP	0	0%	0	0%	0	0%
Sub Jumlah (2)		69.076.934.535	100%	96.775.666	100%	69.173.710.201	100%
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0%	0	0%	0	0%
2	Aset Tak Berwujud	0	0%	0	0%	0	0%
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	3.114.864	0%	565.109	1%	3.679.973	0%
Sub Jumlah (3)		3.114.864	0%	565.109	1%	3.679.973	0%
Total		69.093.949.399	100%	97.340.775	100%	69.191.290.174	100%

Tabel 40. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	0	0%	0	0%	0	0%
Sub Jumlah (1)		0	0%	0	0%	0	0%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	0	0%	0	0%	0	0%
2	Peralatan dan Mesin	5.769.811.219	40%	56.772.721	98%	5.826.583.940	40%
3	Gedung dan Bangunan	8.600.109.455	60%	1.046.235	2%	8.601.155.690	60%
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	0%	0	0%	0	0%
5	Aset Tetap Lainnya	0	0%	0	0%	0	0%
6	KDP	0	0%	0	0%	0	0%
Sub Jumlah (2)		14.369.920.674	100%	57.818.956	100%	14.427.739.630	100%
III	Aset Lainnya						



1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0%	0	0%	0	0%
2	Aset Tak Berwujud	0	0%	0	0%	0	0%
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	3.114.864	0%	565.109	0%	3.679.973	0%
Sub Jumlah (3)		3.114.864	0%	565.109	0%	3.679.973	0%
Total		14.373.035.538	100%	58.384.065	100%	14.431.419.603	100%

Tabel 41. Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Per Akun Neraca

B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	Aset Lancar			0
1	Persediaan	13.900.200	13.900.200	0
II	Aset Tetap	54.800.674.663	54.800.674.663	0
1	Tanah	48.759.467.000	48.759.467.000	0
2	Peralatan dan Mesin	6.763.559.13	6.763.559.13	0
3	Gedung dan Bangunan	13.640.844.200	13.640.844.200	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	9.839.869	9.839.869	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(14.373.035.538)	(14.373.035.538)	0



No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
III	Aset Lainnya	0	0	0
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-Lain *)	3.679.973	3.679.973	0
3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.679.973)	(3.679.973)	0
Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)		54.814.574.863	54.814.574.863	0

Tabel 42. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir (*Unaudited*), dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Per 31 Desember 2023	73.581.184.674	241.827.000	0,329%
2	Per 30 Juni 2024	73.776.450.174	195.265.500	0,265%
3	Per 31 Desember 2024	68.888.530.174	4.887.920.000	7,095%
4	Per 30 Juni 2025	68.889.230.174	700.000	0,001%
5	Per 31 Desember 2025	69.177.390.174	288.160.000	0,417%

Tabel 43. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Negeri Pontianak per Periode Laporan *Unaudited*



B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah	7	48.759.467.000	7	48.759.467.000
2	Alat Angkutan Bermotor	10	1.815.743.941	10	1.815.743.941
3	Peralatan dan Mesin Non TIK	1.052	3.008.161.476	1.028	2.720.001.476
4	Peralatan dan Mesin TIK	191	1.675.670.688	190	1.674.970.688
5	Alat Berat	2	267.663.000	2	267.663.000
6	Bangunan Gedung	6	12.308.257.200	6	12.308.257.200
7	Rumah Negara	12	1.332.587.000	12	1.332.587.000
8	Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
9	Instalasi dan Jaringan	0	0	0	0
10	Bangunan Air dan Irigasi	0	0	0	0
11	Aset Tetap lainnya	30	9.839.869	30	9.839.869
12	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0
JUMLAH		1.310	69.177.390.174	1.285	68.888.530.174

Tabel 44. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025



b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Pontianak selama periode Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Pemusnahan	Penghapusan	Alih Fungsi	Alih Status	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
	a. dikembalikan	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	2	0	0	0	0	0	2
5	Dalam proses tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan Keputusan oleh Pengguna Barang	32	0	0	0	0	0	0	32

Tabel 45. Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025



c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Tabel 46. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025

d. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

1. Daftar Barang Rusak Berat

Tidak ada Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.

2. Daftar Barang Hilang

Tidak ada Daftar barang hilang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.

e. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

1. BMN dalam sengketa/perkara/bermasalah

Pengadilan Negeri Pontianak tidak ada BMN dalam sengketa/perkara/bermasalah.



2. Tanah Belum Bersertipikat

Pengadilan Negeri Pontianak memiliki tanah yang sudah bersertifikat. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang berada di Jl. Karel Satsuit Tubun bersertifikat atas nama Pemprov Kalimantan Barat dan masih dalam proses perubahan nama di BPN.

f. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Tidak terdapat langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Laporan Barang Pengguna Satker Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2025.

g. Pengungkapan Penting Lainnya

Tidak terdapat pengungkapan penting lainnya yang perlu dilakukan pada Laporan Barang Pengguna Satker Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2025.

h. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Pengadilan Negeri Pontianak telah melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang (Awal)	NUP	Nama Barang (Akhir)	NUP
1	2.01.01.04.001	1	2.01.01.04.026	1
2	2.01.01.04.001	3	2.01.01.04.026	2
3	4.01.01.01.001	1	4.01.01.24.004	1
4	4.01.01.01.001	2	4.01.01.24.004	2

Tabel 47. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Pontianak



C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKPP Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, Tidak Terdapat temuan BPK pada Pengadilan Negeri Pontianak.

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

TAHUN 2025 (UNAUDITED)



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Negeri Pontianak telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pontianak selama tahun 2025.

a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pontianak telah mengajukan RKBMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:



No	Jenis RKBMN	Nama Barang	Hasil Telaah
1	Pemeliharaan/Pengadaan	Stationary Generating Set	Disetujui
2	Pemeliharaan/Pengadaan	Sedan	Disetujui
3	Pemeliharaan/Pengadaan	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Disetujui
4	Pemeliharaan/Pengadaan	Sepeda Motor	Disetujui
5	Pemeliharaan/Pengadaan	A.C. Split	Disetujui
6	Pemeliharaan/Pengadaan	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Disetujui
7	Pemeliharaan/Pengadaan	P.C Unit	Disetujui
8	Pemeliharaan/Pengadaan	Lap Top	Disetujui
9	Pemeliharaan/Pengadaan	Note Book	Disetujui
10	Pemeliharaan/Pengadaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
11	Pemeliharaan/Pengadaan	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	Disetujui
12	Pemeliharaan/Pengadaan	Gedung Pos Jaga Permanen	Disetujui
13	Pemeliharaan/Pengadaan	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kelas I A	Disetujui
14	Pemeliharaan/Pengadaan	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Disetujui
15	Pemeliharaan/Pengadaan	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Disetujui
16	Pemeliharaan/Pengadaan	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Disetujui
17	Pemeliharaan/Pengadaan	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Disetujui
18	Pemindahtanganan	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Disetujui



Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujui sebanyak 160 usulan dan tidak disetujui sebanyak 0 usulan.

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pontianak juga telah mengajukan usulan RP3BMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RP3BMN	Jumlah Usulan	Hasil Telaah
1	Pemindahtanganan	1	Disetujui

b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Pontianak yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 1.285 unit dengan nilai sebesar Rp 68.888.530.174,-. Namun, masih terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya sebanyak 25 unit dengan nilai sebesar Rp 288.860.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BMN	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan		Jumlah BMN	
	Kuantitas (A)	Nilai (Rp) (C)	Kuantitas (B)	Nilai (Rp) (D)	Kuantitas (A+B)	Nilai (C+D)
Tanah	0	0	7	48.759.467.000	7	48.759.467.000
Alat Angkutan Bermotor	0	0	10	1.815.743.941	10	1.815.743.941
Peralatan dan Mesin Non TIK	24	288.160.000	1,028	2.720.001.476	1052	3.008.161.476
Peralatan dan Mesin TIK	1	700.000	190	1.674.970.688	191	1.674.971.388
Alat Berat	0	0	2	267.663.000	2	267.663.000
Bangunan Gedung	0	0	6	12.308.257.200	6	12.308.257.200
Rumah Negara	0	0	12	1.332.587.000	12	1.332.587.000
Jalan dan Jembatan	0	0	0	0	0	0



Instalasi dan Jaringan	0	0	0	0	0	0
Bangunan Air dan Irigasi	0	0	0	0	0	0
Aset Tetap lainnya	0	0	30	9.839.869	30	9.839.869
Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
Total	25	288.860.000	1285	68.888.530.174	1310	69.176.690.874

c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Negeri Pontianak telah melakukan permohonan terkait pengelolaan BMN berdasarkan data di SIMAN pada Menu Pengelolaan – Monitoring Pengelolaan ke Pengelola Barang (melalui KPKNL setempat) sampai dengan 31 Desember 2025 rincian sebagai berikut:

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola

Pengadilan Negeri Pontianak tidak memiliki permohonan yang masih dalam proses ke Pengelola Barang.

2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Negeri Pontianak tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Pengadilan Negeri Pontianak telah menerima Keputusan dari Pengelola Barang dengan nilai sebesar Rp 786.261.750,-, dengan rincian sebagai berikut



No	No. Tiket	No. Keputusan	Jenis Barang	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL250219092 23807641	751/SEK/SK.PL1.2/III/2025	Peralatan dan Mesin	188.180.000
2	PPL250319115 54594325	90/MK/KNL.1101/2025	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	585.400.000
3	PPL250319113 65223902	91/MK/KNL.1101/2025	Tanah dan Bangunan Rumah Negara	5.928.000
4	PPL250109151 10036175	S-103/MK/KNL.1101/2025	Sewa Ruang Dharmayukti	240.000
5	PPL250109104 31209365	S-102/MK/KNL.1101/2025	Sewa Kantin	6.513.750

4. Selesai Serah Terima

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Pengadilan Negeri Pontianak telah menerima Keputusan dari Pengguna Barang dengan nilai sebesar Rp 786.261.750,-, dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Tiket	Jenis Permohonan (PSP, Penjualan, dll)	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL25021909223807641	PSP	188.180.000
2	PPL25031911554594325	PSP	585.400.000
3	PPL25031911365223902	PSP	5.928.000
4	PPL25010915110036175	Sewa	240.000
5	PPL25010910431209365	Sewa	6.513.750

LAMPIRAN PENJELASAN BMN

TAHUN 2025 (UNAUDITED)



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
PENJELASAN TELAAH DATA ATAS PERMASALAHAN TO DO LIST MONSAKTI
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 (Unaudited)

No	Kode Satker	Nama Satker	Tahun	Eselon	Wilayah	Kode	Uraian	Nilai (Rp)	Penjelasan
1	005011300099066000KD	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	2025	BUA	Kalimantan Barat	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	85.555.000	terdapat transaksi pengembangan nilai aset (jangkung) pada tanggal 20 april 2025 berupa pemasangan trucktile untuk sarana dan prasarana penyanggah disabilitas.
2	005011300099066000KD	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	2025	BUA	Kalimantan Barat	391121	Koreksi Atas Reklasifikasi Persewaan atau Aset Tetap atau Aset Lainnya	-29.800.000	Reklasifikasi Kebiar Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Reklasifikasi Masuk Gedung Kantor Kantor Pengadilan Negeri LA karena perubahan kodefikasi BMN

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

ANTARA UAKPA DAN UAKPB
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**
Jln. Sultan Abdurrahman No. 89 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak 78116
Telp. (0561) 734100 www.pn-pontianak.go.id, pengadilannegeriptk@gmail.com

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
Pada Pengadilan Negeri Pontianak
Periode Unaudited - Tahun Anggaran 2025
Nomor : BA/05/099066/II/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Rizka Kamelya, S.T.
NIP : 19920521 202506 2 006
Jabatan : Operator Aset dan Persediaan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II Nama : Lies Ertanti, S.E.
NIP : 198401242011012009
Jabatan : Operator GLP

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna (LBP) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/ Barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKK/L) untuk periode Unaudited - Tahun Anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Unaudited Tahun Anggaran 2025		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA (A+B+C)	56.047.414.072	(1.232.839.209)	54.814.574.863
A	ASET LANCAR	60.107.100	(46.206.900,00)	13.900.200
1	Persediaan	60.107.100	(46.206.900,00)	13.900.200
B	ASET TETAP	55.987.306.972	(1.186.632.309)	54.800.674.663
1	Tanah	48.759.467.000	0	48.759.467.000
2	Peralatan dan Mesin	6.474.699.132	288.860.000	6.763.559.132
3	Gedung dan Bangunan	13.640.844.200	0	13.640.844.200
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
6	Aset Tetap Lainnya	9.839.869	0	9.839.869
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(12.897.543.229)	(1.475.492.309)	(14.373.035.538)
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-lain	3.679.973	0	3.679.973
3	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.679.973)	0	(3.679.973)
II	BMN NON NERACA	47.529.690	(8.572.980)	38.956.710
1	Ekstrakomptabel	96.640.775	700.000	97.340.775
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	(49.111.085)	(9.272.980)	(58.384.065)
III	TOTAL GABUNGAN (I + II)	56.094.943.762	(1.241.412.189)	54.853.531.573

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Periode Unaudited Tahun Anggaran 2025, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Aset dan Persediaan

Rizka Kamelya, S.T.
NIP. 19920521 202506 2 006

Operator GLP

Lies Ertanti, S.E.
NIP. 198401242011012009

Mengetahui
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



Yuniar Nelly, S.T., M.M.
NIP. 19770424 200604 2001

LAPORAN POSISI BMN DI NERACA

POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099066 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl.Data : 10/02/26 6:35 AM
Tgl.Cetak : 10/02/26 1:56 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	5,528,600
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	8,371,600
131111	Tanah	48,759,467,000
132111	Peralatan dan Mesin	6,689,780,966
133111	Gedung dan Bangunan	13,617,846,700
135121	Aset Tetap Lainnya	9,839,869
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5,769,811,219)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(8,600,109,455)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,114,864
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(3,114,864)
J U M L A H		54,720,914,061

Pontianak, 10 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
197706242006042001

LAPORAN POSISI BMN DI NERACA (SALDO AWAL)

POSISI PER 01 JANUARI 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2025(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099066 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tanggal : 22/02/26 12:27 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	30,529,900
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	29,577,200
131111	Tanah	48,759,467,000
132111	Peralatan dan Mesin	6,401,620,966
133111	Gedung dan Bangunan	13,617,846,700
135121	Aset Tetap Lainnya	9,839,869
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5,304,747,414)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7,589,680,951)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,114,864
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(3,114,864)
J U M L A H		55,954,453,270

LAPORAN PERSEDIAAN
POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

UAPB : MAHKAMAH AGUNG
 UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 UAPPB-W : PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
 KODE UAKPB : 005.01.1300.099066

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	624,100
000023	Pensil 2B	156,100
000066	Spidol White Board	125,000
000067	Spidol Marker Permanent	0
000068	Pulpen Balliner	0
000085	spidol kecil	0
000144	Pulpen Kenko K1	0
000147	Pulpen Joyko Spirit	343,000
000148	Pulpen Tizo	0
000152	Pulpen Pilot	0
000157	Kertas Hvs warna	0
000159	Balliner	0
000160	Spidol Snowman OPM	0
000161	Pulpen Kenko Easy Gel	0
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	46,000
000003	Tinta stempel	0
000062	Bantalan Stempel	0
000064	Stick Note	46,000
000065	Bantalan Stempel 1	0
1010301003	Penjepit Kertas	123,000
000104	binder clips No. 200	0
000131	binder clip 260	0
000132	paper clip no. 3	0
000133	Paper Clip No. 5	0
000134	Binder Clip No. 111	48,000
000137	Binder Clip 105	0
000138	Binder Clip 107	0
000140	Binder Clip 280	0
000141	Clip Bulldog	75,000
000142	Pelubang Kertas	0
1010301004	Penghapus/Korektor	0
000138	Penghapus pensil	0
000141	tipe eks kertas	0
1010301005	Buku Tulis	126,000
000012	Buku ekspedisi	126,000
000013	Buku Folio 100 lbr	0
000083	buku folio isi 200	0
000084	Buku Double Folio	0
000085	Buku Kwitansi	0
000086	Buku Bloknote	0
000087	Buku Folio Isi 50	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.01.1300.099066

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
1010301006	Ordner Dan Map	0
000047	Map Kertas Biasa	0
000049	Ordner Besar	0
000050	Map Plastik Jepit	0
000101	map plastik snailhakter	0
000140	File Box	0
000144	Zipper Bag	0
000146	Map Biola	0
000147	map file plastik	0
000150	map forte	0
000151	sheet protector 100 lbr	0
000153	clear sheet protector	0
1010301007	Penggaris	0
000086	penggaris besi 30 cm	0
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	473,000
000064	Cutler	473,000
1010301010	Alat Perekat	174,000
000026	Lakban Hitam 2	0
000079	isolasi bening	0
000147	Lem Stick	0
000148	Lakban Bening 1	0
000150	Double Tape 2	0
000152	Lakban Bening 2	144,000
000153	Double Tape 3M	0
000157	DOUBLE TAPE FOAM 20 mm	30,000
000158	Double Tape Foam 25 mm	0
000161	Lakban Kuning 2	0
000163	Solasi Kertas	0
000165	Isolasi Band	0
1010301012	Staples	0
000002	Staples No. 10	0
000003	Staples No. 3	0
000006	Saples Guntaker	0
1010301013	Isi Staples	0
000005	Isi Staples No. 10	0
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	0
000006	Pelubang Kertas	0
000116	gunting Besar	0
000117	Gunting Sedang	0
000120	Lembar Disposisi	0
000121	Keranjang Surat	0
000122	Isi Pulpen	0
000123	stryofoam	0
000124	mika meja	0
000126	Pembatas buku	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.01.1300.099066

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
000127	materai 10.000	0
000128	Kalkulator	0
000129	Kwitansi	0
000130	Push Pin	0
000131	Pelubang Kertas	0
1010302001	Kertas HVS	577,500
000002	HVS Warna	577,500
000005	HVS A4 80gsm	0
000006	HVS F4 80gsm	0
000009	Kertas HVS 80 gr	0
000010	Kertas HVS F4 75 Gr	0
000011	Kertas HVS A4 75 Gr	0
1010302002	Berbagai Kertas	553,000
000041	Karbon	0
000057	Kertas Kissing	0
000103	kertas stiker	0
000136	kertas stiker undangan	0
000137	Label CD	0
000141	Memo Pembatas (Memo Stiker)	115,000
000145	kertas buffalo	0
000150	Kertas Foto	438,000
000151	Kertas Jasmin	0
000152	Kertas Samson	0
000153	Kertas Concard	0
000154	Ketas Pindo	0
000155	Kertas Termal	0
000156	Tissue Wajah	0
000157	Tissue Napkin	0
000160	Tissue Wajah	0
000161	Tissue Napkin	0
000162	Memo Pembatas (Kertas)	0
1010302004	Amplop	1,290,000
000010	Amplop Coklat Uk. Kabinet	700,000
000011	Amplop Putih Royal	0
000078	Amplop cassing uk. map	500,000
000080	Amplop Uk. Folio	90,000
000081	Amplop No. 90	0
000082	Amplop Cassing per Pcs	0
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	0
000002	Kertas Foto	0
000003	Kertas Thermal	0
000004	Kertas Buffalo	0
000005	Kertas BC Pindo	0
000006	Kertas Samson	0
1010303001	Transparant Sheet	1,150,000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.01.1300.099066

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
000001	Plastik File Uk, HVS	1,150,000
1010304002	Computer File/Tempat Disket	0
000135	CD Case	0
1010304004	Tinta/Toner Printer	0
000032	Tinta Canon Black	0
000081	Tinta canon warna	0
000085	Catridge Canon 810	0
000086	Catridge Canon 811	0
000087	Catridge Canon 740	0
000089	Tinta Epson Ori	0
000091	Catridge Canon 745	0
000092	Catridge Canon 746	0
000093	Tinta Epson 664	0
000094	Tinta Botol Pixma 790	0
000095	Tinta Suntik Hitam	0
000096	Tinta Botol Epson Seri L	0
000097	Tinta Epson 003	0
000101	Catridge HP 803 black	0
000102	Catridge Canon BH-7	0
000103	Tinta HP GT-53 Hitam Botol	0
000104	Tinta Canon 71-PGBK	0
000105	Catridge HP X4E75AA	0
1010304006	USB/Flash Disk	392,000
000126	Flash Disc 8 GB	0
000127	Flash Disc 16 GB	0
000128	Flash Disc 32 GB	392,000
000129	Flash Dish 64 GB	0
000130	USB 2.0	0
1010304008	CD/DVD Drive	0
000001	CD-R	0
1010304009	Harddisk Internal	0
000001	Hardisk Internal	0
1010304010	Mouse	0
000001	Mouse	0
000002	Mouse M.170	0
000003	Alas Mouse	0
1010304011	CD/DVD	0
000001	cd link	0
000002	DVD Blank	0
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	0
000001	Keyboard Jenius	0
000002	Alas Mouse	0
000003	Keyboard dekstop	0
000004	Catridge 811 Warna	0
000005	Catridge 810 Hitam	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.01.1300.099066

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
000006	USB Adaptor	0
1010306001	Kabel Listrik	0
000120	Kabel	0
000123	Kabel Hansonic	0
1010306002	Lampu Listrik	0
000092	lampu bohlam 25 watt	0
000100	lampu pilips 8w	0
000104	Lampu LTD 12 watt	0
000105	Lampu LED Philips 35 Watt	0
000106	Lampu LED Philips 12 Watt	0
000107	lampu LED Philips 2018	0
000108	LAMPU 20 WT	0
000110	Lampu 40 Wat	0
000111	Lampu Pilip(3+1)	0
000112	Lampu 75 W F	0
000113	Lampu Starlux	0
000114	Lampu Philip LED 14 W	0
000115	Lampu Down Light 18W	0
000116	Lampu Bulat 18 W	0
000117	Lampu 12 W	0
000118	Lampu Philips 10W	0
000119	Lampu 30 W	0
000120	LED 32W	0
000121	LED IN LITE	0
1010306003	Stop Kontak	0
000001	Stop Kontak 4 Lub.	0
000005	Colokan	0
1010306005	Stacker	0
000029	Stacker	0
1010306010	Batu Baterai	0
000021	Baterai AA	0
000022	Baterai AAA	0
000053	Baterai 9V	0
000093	carger baterai	0
000094	baterai cas	0
1010306999	Alat Listrik Lainnya	0
000146	Terminal Listrik	0
1010309001	Meterai	0
000001	Materai 10.000	0
1010309003	Stempel	0
000001	Stempel	0
000002	Stempel Laser	0
000003	stempel laser kantor	0
000004	Bantalan Stempel	0
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.01.1300.099066

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
000001	Kalkulator	0
000002	Tissue Napkin (Kode Salah)	0
000003	Tissue Wajah (Kode Salah)	0
000004	Id Card/Lanyard	0
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	0
000001	Push Pin	0
000002	Jam Dinding	0
000003	Benang Kasur	0
000008	Kit Black Magic	0
000009	Bell Alarm	0
000012	ID Card + Tali	0
000019	Kalkulator	0
000020	Kit Shampo Mobil	0
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	0
000001	Baygon Semprot	0
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0
000001	Materai 6000	0
000002	Kaki Dispenser	0
000003	Tutup Galon Air 40 X	0
000009	Butterfly Tusukan Bon	0
000011	Name Tag	0
000012	Plastik Meteran Tebal	0
000013	Derk Set/Kabinet Kecil untuk Meja	0
Jumlah per Akun		5,528,600
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	1,103,000
000055	Sapu Ijuk	600,000
000056	Sekop Sampah	258,000
000105	sapu lidi	245,000
000112	sikat gagang (WC)	0
000148	Sikat Closet	0
000148	sapu rotan	0
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	966,000
000039	Serbet tangan	0
000040	Lap Pel	966,000
000065	Pel Sumbu	0
000137	Lap Kanebo	0
000141	Pel Nagoya B	0
000142	Pel Nagoya T	0
000144	Pembersih lantai	0
000145	Vixal	0
000146	Wipol Botol	0
000147	Refil Wipol	0
000148	Pembersih Kaca Spray	0
000149	Refil Pembersih Kaca	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.01.1300.099066

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
000150	Kemoceng	0
000151	Sponge Cuci Piring	0
000152	Serbet Tangan LusIn	0
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	108,000
000051	Gayung	108,000
000054	Ember	0
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	232,000
000058	Tempat sampah	232,000
000143	Keset Perca	0
000144	Plastik Sampah Uk.60x100	0
000145	Plastik Sampah Uk. 90x120	0
000147	Tempat Sampah 42 L	0
000151	kantong plastik belanja	0
1010305006	Alat Pengikat	0
000094	tali rapia besar	0
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	4,940,100
000017	WIPOl	807,500
000037	Pembersih Lantai	58,500
000038	Vixal	700,000
000042	Sabun cuci tangan	0
000089	Pembersih kaca	151,700
000111	pembersih lantai (axi)	0
000123	Kapur Barus Ball Jumbo	0
000127	Sabun Cuci Tangan Lifeboy	0
000135	kapur barus	0
000136	Braso	0
000137	Pembersih Furniture	0
000140	Sabun Tangan 3,7 Liter	2,180,000
000142	Refil Pembersih Kaca	23,400
000145	Baygon Semprot	392,000
000146	Refil Wipol	0
000147	Pembersih Lantai 4Lt	0
000148	Sabun Cuci Tangan 5L	0
000149	Kapur Barus Gantung	627,000
000150	Kapur Barus Kecil	0
000151	Kit Black	0
1010305012	Pengharum Ruangan	1,022,500
000016	Pengharum Gantung	0
000080	Pengharum semprot	0
000106	refil pengharum matic	0
000108	swalow Jumbo	562,500
000124	Refil Pengharum Matic	0
000134	Pengharum Mobil	0
000135	Pengharum Automatic	0
000136	Dahlia Refill S.Q. Gantung	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.01.1300.099066

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
000137	Glad Denamon	0
000139	Mesin Pengharum Matic	460,000
000140	Refill Pengharum Ruangan Ace	0
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	0
000016	Tissue Wajah (Kode Salah)	0
000102	Tissue Napkin (Kode Salah)	0
000143	Bingkai Foto	0
000146	Disenser Sabun	0
000148	Tempat Tissue (Kode Salah)	0
000150	Taplak Meja	0
000151	Tissu interfol (Kode Salah)	0
Jumlah per Akun		8,371,600
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	
1010501001	Pita Cukai, Materai, Leges	0
000001	Materai 10.000 (Kode Salah)	0
Jumlah per Akun		0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
1010501008	Barang Persediaan	0
000001	Refil Pembersih Kaca (Kode Salah)	0
000002	Kapur Barus Kecil (Kode Salah)	0
000003	Sabun Cuci Tangan 3,7l (Kode Salah)	0
000004	Tissue (Kode Salah)	0
Jumlah per Akun		0
117131	Bahan Baku	
1010105999	Bahan Baku Lainnya	0
000002	Id Card	0
Jumlah per Akun		0
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	
1011001007	Barang Persediaan	0
000001	Kapur Barus Ball Jumbo (Salah Kode)	0
000006	Pembersih Kaca Spray (Kode Salah)	0
Jumlah per Akun		0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.01.1300.099066

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
Total Jumlah		13,900,200

Keterangan

- 1. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi rusak
- 2. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi usang

Disetujui tanggal : 31-12-2025
Kuasa Pengguna Barang



Yuniar Nelly, S.T., M.M.
197706242006042001

Pontianak, 31-12-2025
Petugas Pengelola Persediaan



Rusli
198111102025211047

LAPORAN BMN INTRAKOMPTABEL

POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

Tgl Data : 10/02/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 10/02/26 12:23 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099066 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		9,850	48,759,467,000	4,153	30,609,097,000	4,153	30,609,097,000	9,850	48,759,467,000
20101	TANAH PERSIL	-	9,850	48,759,467,000	4,153	30,609,097,000	4,153	30,609,097,000	9,850	48,759,467,000
132111	Peralatan dan Mesin		999	6,401,620,966	24	288,160,000	0	0	1,023	6,689,780,966
30103	ALAT BANTU	-	2	267,663,000	0	0	0	0	2	267,663,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	10	1,815,743,941	0	0	0	0	10	1,815,743,941
30501	ALAT KANTOR	-	159	508,876,842	3	20,100,000	0	0	162	528,976,842
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	578	1,745,358,575	20	254,060,000	0	0	598	1,999,418,575
30601	ALAT STUDIO	-	60	336,358,820	1	14,000,000	0	0	61	350,358,820
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	8	54,069,100	0	0	0	0	8	54,069,100
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	1	1,900,000	0	0	0	0	1	1,900,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	101	1,305,250,036	0	0	0	0	101	1,305,250,036
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	80	366,400,652	0	0	0	0	80	366,400,652
133111	Gedung dan Bangunan		16	13,617,846,700	2	12,083,693,700	2	12,083,693,700	16	13,617,846,700
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	5	12,290,441,700	2	12,083,693,700	2	12,083,693,700	5	12,290,441,700
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	11	1,327,405,000	0	0	0	0	11	1,327,405,000
135121	Aset Tetap Lainnya		30	9,839,869	0	0	0	0	30	9,839,869
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	30	9,839,869	0	0	0	0	30	9,839,869
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		15	3,114,864	0	0	0	0	15	3,114,864
30501	ALAT KANTOR	-	13	1,855,604	0	0	0	0	13	1,855,604
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1	32,760	0	0	0	0	1	32,760
30601	ALAT STUDIO	-	1	1,226,500	0	0	0	0	1	1,226,500
TOTAL				68,791,889,399		42,980,950,700		42,692,790,700		69,080,049,399

Pontianak, 10 Februari 2026
 Penanggung Jawab UAKPB
 Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak

 YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
 197706242006042001

LAPORAN BMN EKSTRAKOMPTABEL

POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099066 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 22/02/26 12:48 AM
Tgl Cetak : 22/02/26 1:14 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED							
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU		
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL			
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8		
132111	Peralatan dan Mesin		209	73,078,166	1	700,000	0	0	210	73,778,166
30501	ALAT KANTOR	-	16	2,930,846	0	0	0	0	16	2,930,846
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	169	64,220,320	0	0	0	0	169	64,220,320
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	15	2,607,000	0	0	0	0	15	2,607,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	9	3,320,000	1	700,000	0	0	10	4,020,000
133111	Gedung dan Bangunan		2	22,997,500	0	0	0	0	2	22,997,500
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	1	17,815,500	0	0	0	0	1	17,815,500
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	1	5,182,000	0	0	0	0	1	5,182,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		7	565,109	0	0	0	0	7	565,109
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	7	565,109	0	0	0	0	7	565,109
TOTAL				96,640,775		700,000		0		97,340,775

Pontianak, 22 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Yunar Nelly, S.T., M.M.
191706242006042001

**LAPORAN BMN GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
POSISI PER 31 DESEMBER 2025**



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099066 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 10/02/26 6:35 AM
Tgl Cetak : 10/02/26 12:31 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		9,850	48,759,467,000	4,153	30,609,097,000	4,153	30,609,097,000	9,850	48,759,467,000
20101	TANAH PERSIL	-	9,850	48,759,467,000	4,153	30,609,097,000	4,153	30,609,097,000	9,850	48,759,467,000
132111	Peralatan dan Mesin		1,208	6,474,699,132	25	288,860,000	0	0	1,233	6,763,559,132
30103	ALAT BANTU	-	2	267,663,000	0	0	0	0	2	267,663,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	10	1,815,743,941	0	0	0	0	10	1,815,743,941
30501	ALAT KANTOR	-	175	511,807,688	3	20,100,000	0	0	178	531,907,688
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	747	1,809,578,895	20	254,060,000	0	0	767	2,063,638,895
30601	ALAT STUDIO	-	60	336,358,820	1	14,000,000	0	0	61	350,358,820
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	23	56,676,100	0	0	0	0	23	56,676,100
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	1	1,900,000	0	0	0	0	1	1,900,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	101	1,305,250,036	0	0	0	0	101	1,305,250,036
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	89	369,720,652	1	700,000	0	0	90	370,420,652
133111	Gedung dan Bangunan		18	13,640,844,200	2	12,083,693,700	2	12,083,693,700	18	13,640,844,200
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	6	12,308,257,200	2	12,083,693,700	2	12,083,693,700	6	12,308,257,200
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	12	1,332,587,000	0	0	0	0	12	1,332,587,000
135121	Aset Tetap Lainnya		30	9,839,869	0	0	0	0	30	9,839,869
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	30	9,839,869	0	0	0	0	30	9,839,869
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		22	3,679,973	0	0	0	0	22	3,679,973
30501	ALAT KANTOR	-	13	1,855,604	0	0	0	0	13	1,855,604
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	8	597,869	0	0	0	0	8	597,869
30601	ALAT STUDIO	-	1	1,226,500	0	0	0	0	1	1,226,500
TOTAL				68,888,530,174		42,981,650,700		42,692,790,700		69,177,390,174

Pontianak, 10 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
197706242006042001

LAPORAN BMN
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

- Pencarian Menu
- Administrasi
- Referensi
- Persediaan
- Aset Tetap
 - RUH
 - Monitoring
 - Cetak
 - Buku/Daftar
 - Laporan
 - Laporan Kondisi Barang
 - Laporan BMN
 - Laporan Konsesi Jasa Mitra
- ADK
- Penutupan Periode
- Pengaturan
- Likuidasi
- Normalisasi
- Konsesi Jasa Mitra
- Akuntansi dan Pelaporan

Kode UAKPB 005011300099066000KD

Laporan Barang

Pilihan Cetak

Level Laporan	SATKER
Jenis Laporan	Lapc
Laporan	Lapc
Sub Laporan	KON
Rincian Barang	KELO
Periode Sampai Dengan	2025
Tipe File	<input checked="" type="radio"/> PDF <input type="radio"/> Excel

Unduh Keluar

Warning

i Laporan tidak ditemukan.

OK

LAPORAN BMN ASET TAK BERWUJUD
POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099066 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 10/02/26 6:35 AM
Tanggal : 10/02/26 12:35 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pontianak, 10 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
197706242006042001

LAPORAN BMN BERSEJARAH
POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

- sakti
- Pencarian Menu
- Administrasi
- Referensi
- Persediaan
- Aset Tetap**
- RUH
- Monitoring
- Cetak**
- Buku/Daftar
- Laporan**
- Laporan Kondisi Barang
- Laporan BMN
- Laporan Konsesi Jasa Mitra
- ADK
- Penutupan Periode
- Pengaturan
- Likuidasi
- Normalisasi
- Konsesi Jasa Mitra
- Akuntansi dan Pelaporan

Kode UAKPB 005011300099066000KD

Laporan Barang

Pilihan Cetak

Level Laporan: SATKER

Jenis Laporan: Lapo

Laporan: Lapo

Sub Laporan: BAR

Rincian Barang: KELC

Periode Sampai Dengan: 2025

Tipe File: PDF Excel

Buttons: Unduh, Keluar

Warning

Laporan tidak ditemukan.

OK

**DAFTAR BMN RUSAK BERAT
YANG DIUSULKAN KE PENGELOLA
POSISI PER 31 DESEMBER 2025**



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**DAFTAR BMN YANG DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
KODE UAKPB : 099066

TANGGAL : 22-02-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_po
HALAMAN: 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
JUMLAH											

PONTIANAK, 22 FEBRUARI 2026
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Yuniar Nelly, S.T., M.M.
NIP. 197706242006042001

DAFTAR BMN HILANG
POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
KODE UAKPB : 099066

TANGGAL : 22-02-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dbh_poc
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
JUMLAH											

PONTIANAK, 22 FEBRUARI 2026
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Yuniar Nelly, S.T., M.M.
NIP. 197706242006042001

LAPORAN BARANG BPYDS
POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
KODE UAKPB : 099066

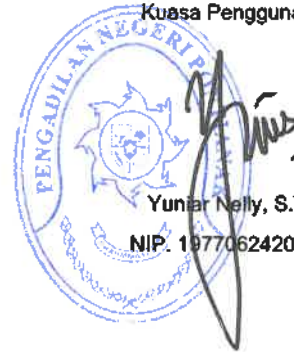
TANGGAL : 22-02-2026
Kode LAP : daftar_bmn_bpybds_p
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

PONTIANAK, 22 FEBRUARI 2026

PENANGGUNG JAWAB UAKPB

Kuasa Pengguna Barang



Yuniar Nelly, S.T., M.M.

NIP. 197706242006042001

LAPORAN BARANG HIBAH DK/TP
POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**DAFTAR BMN HIBAH DK/TP YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
KODE UAKPB : 099066

TANGGAL : 22-02-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dhdktp_poc
HALAMAN: 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

PONTIANAK, 22 FEBRUARI 2026

PENANGGUNG JAWAB UAKPB

Kuasa Pengguna Barang



Yuniar Nelly, S.T., M.M.

NIP. 197706242006042001

**LAPORAN PENYUSUTAN
BMN INTRAKOMPTABEL
POSISI PER 31 DESEMBER 2025**



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099066 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 10/02/26 6:35 AM
Tgl Cetak : 10/02/26 2:44 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANITITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah	-	9,850	48,759,467,000	0	0	0	48,759,467,000
20101	TANAH PERSIL	-	9,850	48,759,467,000	0	0	0	48,759,467,000
132111	Peralatan dan Mesin	-	1,023	8,689,780,968	(5,304,747,414)	(465,063,605)	(5,769,811,219)	919,969,747
30103	ALAT BANTU	-	2	267,663,000	(267,663,000)	0	(267,663,000)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	10	1,815,743,941	(1,355,786,799)	(63,628,572)	(1,439,415,371)	376,328,570
30501	ALAT KANTOR	-	162	528,976,842	(475,576,842)	(15,810,000)	(491,386,842)	37,590,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	598	1,999,418,575	(1,490,267,765)	(178,303,324)	(1,668,571,089)	330,847,486
30601	ALAT STUDIO	-	61	350,358,820	(218,844,910)	(55,109,364)	(273,954,274)	76,404,546
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	8	54,069,100	(53,161,270)	(605,220)	(53,766,490)	302,610
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	1	1,900,000	(570,000)	(380,000)	(950,000)	950,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	101	1,305,250,036	(1,146,233,301)	(103,108,326)	(1,249,341,626)	55,908,410
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	80	366,400,852	(296,643,527)	(28,119,000)	(324,762,527)	41,638,125
133111	Gedung dan Bangunan	-	16	13,817,848,700	(7,589,680,951)	(1,010,428,504)	(8,600,109,455)	5,017,737,245
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	5	12,290,441,700	(7,037,372,394)	(936,787,365)	(7,974,159,759)	4,316,281,941
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	11	1,327,405,000	(552,308,557)	(73,641,139)	(625,949,696)	701,455,304
133121	Aset Tetap Lainnya	-	30	9,839,869	0	0	0	9,839,869
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	30	9,839,869	0	0	0	9,839,869
168112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	15	3,114,864	(3,114,864)	0	(3,114,864)	0
30501	ALAT KANTOR	-	13	1,855,604	(1,855,604)	0	(1,855,604)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1	32,760	(32,760)	0	(32,760)	0
30601	ALAT STUDIO	-	1	1,226,500	(1,226,500)	0	(1,226,500)	0
JUMLAH			10,934	69,080,048,399	(12,897,543,229)	(1,475,492,309)	(14,373,035,538)	54,707,013,861

Pontianak, 10 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
197706242006042001

**LAPORAN PENYUSUTAN
BMN EKSTRAKOMPTABEL**
POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099066 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 10/02/26 6:35 AM
Tgl Cetak : 10/02/26 2:44 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANITITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		210	73,778,186	(47,959,891)	(8,813,030)	(56,772,721)	17,005,445
30501	ALAT KANTOR	-	16	2,930,846	(2,930,846)	0	(2,930,846)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	169	64,220,320	(39,101,845)	(8,638,030)	(47,739,875)	16,480,445
30802	ALAT KOMUNIKASI	-	15	2,607,000	(2,607,000)	0	(2,607,000)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	10	4,020,000	(3,320,000)	(175,000)	(3,495,000)	525,000
133111	Gedung dan Bangunan		2	22,997,500	(568,285)	(459,950)	(1,046,235)	21,951,265
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	1	17,815,500	(534,465)	(356,310)	(890,775)	16,924,725
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	1	5,182,000	(51,820)	(103,640)	(155,460)	5,026,540
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		7	565,109	(565,109)	0	(565,109)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	7	585,109	(565,109)	0	(565,109)	0
JUMLAH			219	97,340,775	(49,111,085)	(9,272,980)	(58,384,065)	38,956,710

Pontianak, 10 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
197706212006042001

LAPORAN AMORTISASI BMN ASET TAK BERWUJUD

POSISI PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

Tgl Data : 22/02/26 12:48 AM
 Tanggal : 22/02/26 1:54 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_satker_

UAPA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 099066 **PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

Pontianak, 22 Februari 2026
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kuasa Pengguna Barang



Yuniar Nelly, S.T., M.M.
 197706242006042001

LAPORAN PNBP

PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : 099066 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Kode Lap : LRA.P.E1.1
 Tanggal : 22/02/26 1:57 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	13,364,000	6,753,750	0	6,753,750	50.54
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	10,468,770	0	10,468,770	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	13,364,000	17,222,520	0	17,222,520	128.87
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	13,364,000	17,222,520	0	17,222,520	128.87
	JUMLAH PENDAPATAN	13,364,000	17,222,520	0	17,222,520	128.87

RESUME ASURANSI BMN

TAHUN ANGGARAN 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

Jln. Sultan Abdurrahman No. 89 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak 78116
Telp. (0561) 734100 www.pn-pontianak.go.id, pengadilannegeriptk@gmail.com

**RESUME PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

1. Laporan Asuransi BMN 2025
Tidak terdapat Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2025.
(rincian sebagaimana terlampir dalam tabel A)
2. Klaim Asuransi BMN 2025
Tidak terdapat klaim asuransi BMN yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Pontianak.
(rincian sebagaimana terlampir dalam tabel B)
3. Rencana Pengasuransian BMN pada 2026
Pengadilan Negeri Pontianak telah mengusulkan Rencana Pengasuransian BMN Tahun Anggaran 2026 pada Aplikasi SIMAN v2, namun status usulan DITOLAK.
(rincian sebagaimana terlampir dalam tabel C)

Pontianak, 23 Februari 2026
Sekretaris



Yuniar Nelly, S.T., M.M.
NIP. 197706242006042001

Tabel A. Laporan Asuransi BMN 2025

DAFTAR LAPORAN PENGASURANSIAN BMN

Tabel A

No	Kode Satuan Kerja				Kode Barang	Nama Barang	NUP	Lokasi							Risiko Diasuransikan	Jangka Waktu		Penanggung Risiko	Nilai Pertanggungan	Besaran Premi	Riwayat Klaim	Nomor Polis	Keterangan
	Kode Pengguna Barang	Kode Unit Eselon I	Kode Wilayah	Kode UAKPB				Jalan	RT/R W	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kotamadya	Propinsi	Kode Pos		TMT Mulai	TMT Berakhir						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Pontianak, 23 Februari 2026
 Sekretaris

Yumar Nelly, S.T., M.M.
 NIP. 197106242006042001



Tabel B. Laporan Klaim Asuransi BMN 2025

LAPORAN KLAIM PENGASURANSIAN BMN

Tabel B

No	Kode Satuan Kerja				Kode Barang	Nama Barang	NUP	Lokasi							Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Tanggal Pengajuan Klaim	Status	Besaran Klaim yang Disepakati	Dokumen Pembayaran		Keterangan
	Kode Pengguna Barang	Kode Unit Eselon I	Kode Wilayah	Kode UAKPB				Jalan	RT/RW	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kotamadya	Propinsi	Kode Pos						Tanggal Penyetoran	No. Bukti Penyetoran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



Pontianak, 23 Februari 2026
 Sekretaris

Yumar Nelly, S.T., M.M.
 NIP. 197706242006042001

DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMN
TA. 2026

Tabel C

No	Kode Satuan Kerja				Kode Barang	Nama Barang	NUP	Lokasi						Tahun Pembangunan	Nilai Perolehan	Risiko	Penggunaan dan Fungsi BMN	Jangka Waktu		Besaran Premi	Pertimbangan	Keterangan	
	Kode Pengguna Barang	Kode Unit Eselon I	Kode Wilayah	Kode UAKPB				Jalan	RT/R W	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	Propinsi					Kode Pos	TMT Mulai				TMT Berakhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	20	23	23
1	005	01	1300	99066	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	JL. SUTAN ABDURRAHMAN NO. 89	-	Sungai Bangkong	Pontianak Kota	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	78116	1976	7.559.007.700	Banjir, Huru Hara	Digunakan sendiri untuk operasional - Gedung Kantor	01-Jan-26	31-Dec-2026	14.823.215	Rawan Rusak Jika Banjir	Pengajuan Ditolak
1	005	01	1300	99066	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Jl. Uray Bawadi No. 23	-	Sungai Bangkong	Pontianak Kota	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	78113	2014	4.524.686.000	Banjir, Huru Hara	Digunakan sendiri untuk operasional - Gedung Kantor	01-Jan-26	31-Dec-2026	8.872.909	Rawan Rusak Jika Banjir	Pengajuan Ditolak

Pontianak, 23 Februari 2026
Sekretaris



Yudiana Nelly S.T., M.M.
N.P. 197706242006042001

**REKAPITULASI KONSTRUKSI
DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2025**



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

LAPORAN BMN BERUPA RUMAH NEGARA

PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

LAPORAN BMN BERUPA RUMAH NEGARA TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

No.	1. Data UMR Kerja					2. Data Bangunan Rumah Negara					3. Data Rata-rata Tanah					4. Status Penggunaan Rumah Negara	5. Status Penghuni Rumah Negara				6. Data Lokal Rumah Negara				7. Koordinat Objek (GPS)		8. Keterangan		
	Kode BA	Nama Kementerian / Lembaga	Kode Eselon I	Nama Eselon I	Kode UAKPB	Nama UAKPB	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Kondisi	Pemilik Tanah	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Sertipikat		Nomor Dokumen Sertipikat Tanah	Subyek yang Menghuni	Nomor Surat Izin Penghunan (SIP)	Besaran Saran Penghunan Rumah Negara	Nama dan Nomor Jalan	RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Kota / Kabupaten	Provinsi		Latitude	Longitude
1	5	Mahkamah Agung RI	1	Badan Urusan Administrasi	990660	Pengadilan Negeri Pontianak	4010201004	1	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Baik	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	2010101001	5	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Sudah	SHP No 58	Digunakan sendiri untuk dinas jabatan	WAKIL KETUA	3648/SEK.PN.W17-U1/PL.1.2/XXII.2025	277,992.00	Jl Gusti Hamzah Nomor 4	Nomor 4	Sungai Jawi Dalam	Pontianak Barat	KOTA PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	-0.0217457	1.093.181.833	Status sertipikat sudah sesuai dengan ketentuan, Terdapat perubahan pada subjek penghuni dan nomor Surat Izin Penghuni (SIP)
2	5	Mahkamah Agung RI	1	Badan Urusan Administrasi	990660	Pengadilan Negeri Pontianak	4010201004	4	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Baik	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	2010101001	6	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Sudah	SHP No 164	Digunakan sendiri untuk dinas jabatan	KETUA	3648/SEK.PN.W17-U1/PL.1.2/XXII.2025	296,525.00	Jl Sulawesi	RT./RW.	Pontianak Kota	Pontianak Kota	KOTA PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	-0.0444528	1.093.282.715	Status sertipikat sudah sesuai dengan ketentuan, Terdapat perubahan pada nomor Surat Izin Penghuni (SIP)
3	5	Mahkamah Agung RI	1	Badan Urusan Administrasi	990660	Pengadilan Negeri Pontianak	4010201004	5	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Baik	Bersertipikat lainnya (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat)	2010101001	7	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Sudah		Digunakan sendiri untuk operasional		0	Jalan Karet Sabuk Tubun Gg. Flamboyan No. 4	0/0	Akoya	Pontianak Selatan	KOTA PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	-0.040921038	1.093.329.073	Rumah Dinas selesai hibah, belum diura, sertifikat tanah masih atas nama Pemrov Kal-bar dan masih dalam proses baik nama di BPN	
4	5	Mahkamah Agung RI	1	Badan Urusan Administrasi	990660	Pengadilan Negeri Pontianak	4010202004	1	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Baik	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	2010101002	2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Sudah	SHP 105	Digunakan sendiri untuk operasional	ASN/PNS	3648/SEK.PN.W17-U1/PL.1.2/XXII.2025	205,920.00	Jalan Akaryang Gg. Kurnia Dalam No 98	RT./RW.	Sungai Bangkong	Pontianak Kota	KOTA PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	-0.0300371	1.093.170.443	Status sertipikat sudah sesuai dengan ketentuan, Terdapat perubahan pada nomor Surat Izin Penghuni (SIP)
5	5	Mahkamah Agung RI	1	Badan Urusan Administrasi	990660	Pengadilan Negeri Pontianak	4010202004	2	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Baik	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	2010101002	2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Sudah	SHP 105	Digunakan sendiri untuk operasional	HAKIM Ad.Hoc	3648/SEK.PN.W17-U1/PL.1.2/XXII.2025	205,920.00	Jalan Akaryang Gg. Kurnia Dalam No 90	RT./RW.	Sungai Bangkong	Pontianak Kota	KOTA PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	-0.0298147	1.093.171.879	Status sertipikat sudah sesuai dengan ketentuan, Terdapat perubahan pada nomor Surat Izin Penghuni (SIP)
6	5	Mahkamah Agung RI	1	Badan Urusan Administrasi	990660	Pengadilan Negeri Pontianak	4010202007	1	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Baik	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	2010101002	1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Sudah	SHP 708	Digunakan sendiri untuk operasional	HAKIM Ad.Hoc	3648/SEK.PN.W17-U1/PL.1.2/XXII.2025	104,958.00	Jalan Sumatra Sudimoro A1	RT./RW.	Parit Tokaya	Pontianak Selatan	KOTA PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	-0.0468985	1.093.291.115	Status sertipikat sudah sesuai dengan ketentuan, Terdapat perubahan pada nomor Surat Izin Penghuni (SIP)
7	5	Mahkamah Agung RI	1	Badan Urusan Administrasi	990660	Pengadilan Negeri Pontianak	4010202007	2	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Baik	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	2010101002	1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Sudah	SHP 708	Digunakan sendiri untuk operasional	HAKIM Ad.Hoc	3648/SEK.PN.W17-U1/PL.1.2/XXII.2025	104,958.00	Jalan Sumatra Sudimoro A2	RT./RW.	Parit Tokaya	Pontianak Selatan	KOTA PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	-0.0469442	1.093.290.261	Status sertipikat sudah sesuai dengan ketentuan, Terdapat perubahan pada nomor Surat Izin Penghuni (SIP)
8	5	Mahkamah Agung RI	1	Badan Urusan Administrasi	990660	Pengadilan Negeri Pontianak	4010202007	3	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Baik	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	2010101002	1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Sudah	SHP 708	Digunakan sendiri untuk operasional	HAKIM	3648/SEK.PN.W17-U1/PL.1.2/XXII.2025	104,958.00	Jalan Sumatra Sudimoro A3	RT./RW.	Parit Tokaya	Pontianak Selatan	KOTA PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	-0.046993	1.093.289.421	Status sertipikat sudah sesuai dengan ketentuan, Terdapat perubahan pada nomor Surat Izin Penghuni (SIP)
9	5	Mahkamah Agung RI	1	Badan Urusan Administrasi	990660	Pengadilan Negeri Pontianak	4010202007	4	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Baik	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	2010101002	1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Sudah	SHP 708	Digunakan sendiri untuk operasional	HAKIM Ad.Hoc	3648/SEK.PN.W17-U1/PL.1.2/XXII.2025	104,958.00	Jalan Sumatra Sudimoro A4	RT./RW.	Parit Tokaya	Pontianak Selatan	KOTA PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	-0.046993	1.093.289.421	Status sertipikat sudah sesuai dengan ketentuan, Terdapat perubahan pada nomor Surat Izin Penghuni (SIP)
10	5	Mahkamah Agung RI	1	Badan Urusan Administrasi	990660	Pengadilan Negeri Pontianak	4010202007	5	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Baik	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	2010101002	1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Sudah	SHP 708	Digunakan sendiri untuk operasional	HAKIM	3648/SEK.PN.W17-U1/PL.1.2/XXII.2025	104,958.00	Jalan Sumatra Sudimoro A5	RT./RW.	Parit Tokaya	Pontianak Selatan	KOTA PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	-0.0468518	1.093.291.926	Status sertipikat sudah sesuai dengan ketentuan, Terdapat perubahan pada nomor Surat Izin Penghuni (SIP)
11	5	Mahkamah Agung RI	1	Badan Urusan Administrasi	990660	Pengadilan Negeri Pontianak	4010202007	6	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Baik	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	2010101002	1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Sudah	SHP 708	Digunakan sendiri untuk operasional	HAKIM	3648/SEK.PN.W17-U1/PL.1.2/XXII.2025	104,958.00	Jalan Sumatra Sudimoro A6	RT./RW.	Parit Tokaya	Pontianak Selatan	KOTA PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	-0.0469442	1.093.290.261	Status sertipikat sudah sesuai dengan ketentuan, Terdapat perubahan pada nomor Surat Izin Penghuni (SIP)

**NERACA PERCOBAAN
BERBASIS AKRUAL
PER 31 DESEMBER 2025**



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 24/02/26 2:21 AM
Tgl Cetak : 24/02/26 8:25 AM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	5,528,600	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	8,371,600	0
0.0	131111	Tanah	48,759,467,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,689,780,966	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	13,617,846,700	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	9,839,869	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,769,811,219
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	8,600,109,455
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,114,864	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,114,864
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	1,487,469,744
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,746,200
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	5,045,313
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	15,997,120,290
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	17,222,520	0
0.0	391111	Ekuitas	0	55,947,662,237
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	85,555,000	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	14,000,000
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	79,650,000
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	29,800,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,535,270
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	10,468,770
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,032,222,720	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	39,717	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	190,544,620	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	74,325,668	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	40,320,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	462,090,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	66,687,782	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	158,310,120	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	471,277,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	50,420,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	206,550,000	0
3.0	511158	Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	3,822,345,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	1,089,402,342	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	5,206,100,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	156,436,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,716	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 24/02/26 2:21 AM
Tgl Cetak : 24/02/26 8:25 AM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	13,495,480	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	3,882,624	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4,900,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	13,108,020	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	40,455,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	7,940,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	707,798,056	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,122,590	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	53,880,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	38,326,925	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,251,302	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	18,548,900	0
3.0	522141	Beban Sewa	176,865,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	709,880,500	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	113,049,300	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	218,365,856	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	20,912,396	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,250,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	409,308,805	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,010,428,504	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	99,259,000	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	42,704,300	0
JUMLAH			87,948,533,362	87,948,533,362

Keterangan :
FINAL

Pontianak, 24 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA


Yuniar Nelly, ST,MM
NIP 197706242006042001

NERACA FACE

PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 24/02/26 2:21 AM
Tgl Cetak : 24/02/26 8:26 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	13,900,200	60,107,100	(46,206,900)	(76.87)
JUMLAH ASET LANCAR	13,900,200	60,107,100	(46,206,900)	(76.87)
ASET TETAP				
Tanah	48,759,467,000	48,759,467,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	6,689,780,966	6,401,620,966	288,160,000	4.50
Gedung dan Bangunan	13,617,846,700	13,617,846,700	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	9,839,869	9,839,869	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(14,369,920,674)	(12,894,428,365)	(1,475,492,309)	11.44
JUMLAH ASET TETAP	54,707,013,861	55,894,346,170	(1,187,332,309)	(2.12)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	3,114,864	3,114,864	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,114,864)	(3,114,864)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	54,720,914,061	55,954,453,270	(1,233,539,209)	(2.20)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,489,215,944	5,964,200	1,483,251,744	24,869.25
Pendapatan Diterima Dimuka	5,045,313	826,833	4,218,480	510.20
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,494,261,257	6,791,033	1,487,470,224	21,903.45
JUMLAH KEWAJIBAN	1,494,261,257	6,791,033	1,487,470,224	21,903.45
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	53,226,652,804	55,947,662,237	(2,721,009,433)	(4.86)
JUMLAH EKUITAS	53,226,652,804	55,947,662,237	(2,721,009,433)	(4.86)
JUMLAH EKUITAS	53,226,652,804	55,947,662,237	(2,721,009,433)	(4.86)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	54,720,914,061	55,954,453,270	(1,233,539,209)	(2.20)

Keterangan :
FINAL

Pontianak, 24 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA

Yuniar Nelly, ST,MM
NIP 197706242006042001

**MONITORING
TRANSFER KELUAR DAN
TRANSFER MASUK
PER 31 DESEMBER 2025**



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK



MONITORING TRANSFER KELUAR/MASUK SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 13

satker : 099066

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
Tidak Ada Data											

LAPORAN ASET SENGGKETA

PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**DATA LAPORAN ASET SENGKETA
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (UNAUDITED)**

No	Kode Satker	Wilayah	Nama Satker	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Jlh Bidang Tanah	Luas	Nilai Perolehan	Jenis Dokumen Kepemilikan Tanah	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Status Penggunaan	Substansi Permasalahan	Bersengketa/Bermasalah	Keterangan	Status	Data Dukung	Keterangan
NIHIL																				

Pontianak, 23 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Yuniar Nelly, S.T., M.M.
NIP. 197706242006042001



REKAPITULASI DAN RINCIAN TRANSAKSI HIBAH MASUK BMN BERUPA ASET TETAP

PER 31 DESEMBER 2025



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
RINCIAN TRANSAKSI HIBAH MASUK BMN BERUPA ASET TETAP
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 (Unaudited)

No	Kode Satker	Nama satker	Jenis Transaksi	Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Nilai	Bulan Transaksi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	'005011300099066000KC	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	103	3060102128	Camera Digital	1	14000000	OKTOBER	MPLH-8265557151036746844
2	'005011300099066000KC	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	103	3050206002	Televisi	1	55000000	OKTOBER	MPLH-826555698103674000C
3	'005011300099066000KC	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	103	3050204004	A.C. Split	1	24650000	OKTOBER	MPLH-826555698103674000C